

**KEARIFAN MASYARAKAT LERENG MERAPI BAGIAN SELATAN, KABUPATEN
SLEMAN – DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

***THE WISDOM OF THE COMMUNITY ON THE SOUTHERN SLOPES OF MERAPI,
SLEMAN DISTRICT – THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA***

Gunawan

Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur

E-mail : gun_prawiro@yahoo.co.id

Accepted: 17 April 2015; Revised: 30 May 2015; Approved: 12 July 2015

Abstract

For hundreds of years, the people on the Southern slopes of Merapi have been living in harmony among the threats of disaster. They keep on running their activities and surviving although Merapi has repetitively occurred. Life-long experience in this settlement certainly provides color (character) to the community who is closely associated with natural and social ties loaded with wisdom. This text aims to uncover how the community interacts with nature, how people recognize the signs of disaster, and how the healing is done by the community. The answer to the question is an important factor in the framework of a comprehensive disaster management. Based on the results of the research paper on the available evidence; in responding to disasters, the wisdom of the community living on the slopes of Merapi is a reflection of the implementation of disaster management as a whole, i.e. starting from the pre-disaster (natural preservation), reading natural phenomena (early detection) to the restoration of the physical environment and social, and psychological victims. Spiritual values (submission and sincerity) and cooperation (mutual assistance) constitute the social capital that has the great strength which is beneficial for recovery, both for the victims and for the environment. Merapi slopes' community is the community who is open to cooperate with outsiders and the inclusion of innovation (both social and technological one).

Keywords: local knowledge, community, disaster management.

Abstrak

Ratusan tahun masyarakat Lereng gunung Merapi bagian selatan hidup harmoni di tengah ancaman bencana. Masyarakat tetap bertahan dan mempertahankan kehidupannya meski erupsi Merapi yang berdampak bencana telah berulang kali terjadi. Pengalaman panjang selama hidup di permukiman ini tentunya memberikan warna (karakter) masyarakat yang lekat berhubungan dengan alam maupun ikatan sosialnya yang sarat dengan kearifannya. Naskah ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana masyarakat berinteraksi dengan alam, bagaimana masyarakat mengenal tanda-tanda bencana, dan bagaimana pemulihan yang dilakukan oleh masyarakat. Jawaban atas pertanyaan ini merupakan faktor penting dalam kerangka manajemen bencana yang komprehensif. Dari hasil telaahan terhadap bukti yang ada, Kearifan masyarakat lereng Merapi dalam menyikapi bencana merupakan suatu cerminan dari implementasi manajemen bencana secara utuh, yakni mulai dari tahap pra bencana (menjaga kelestarian alam), membaca gejala alam (deteksi dini) sampai dengan pemulihan lingkungan fisik dan sosial, serta psikologis bagi korban. Nilai Spiritual (kepasrahan dan keikhlasan) dan kerjasama (gotong royong) merupakan modal sosial yang mempunyai kekuatan besar yang bermanfaat untuk pemulihan, baik bagi korban maupun lingkungan. Masyarakat lereng Merapi merupakan masyarakat yang terbuka untuk bekerjasama dengan masyarakat diluar komunitas dan masuknya inovasi (baik sosial maupun teknologi).

Kata Kunci: kearifan lokal, masyarakat, penanggulangan bencana.

PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia terletak di jalur magma yakni Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik yang lebih dikenal di dunia dengan sebutan *Ring of Fire*. Jalur magma ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Kondisi ini tercermin dari banyaknya gunung api yang berada di Indonesia. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM, Dr Surono mengatakan melalui surat balasan dari MKTRI Nomor 0669/MKTRI/RED/IX/2012 menyatakan bahwa Indonesia memiliki 127 gunung api aktif, atau Indonesia memiliki jumlah gunung api terbanyak di dunia (MTKRI, 2012). Beberapa gunung api yang dikenal dunia antara lain gunung Krakatau, gunung Kelud, gunung Agung, gunung Merapi, gunung Maninjau, gunung Tambora. Diantara gunung tersebut, gunung Merapi termasuk gunung yang paling aktif di dunia. dalam pikiran Rakyat dikemukakan bahwa dari 127 gunung api aktif yang ada, baru 69 gunung yang terpantau dengan alat, khususnya peralatan seismik yang merupakan standar minimum (Rakyat, 2012).

Selama kurun waktu lima tahun (2010-2014) telah terjadi Erupsi Gunung Merapi (2010), Gunung Rokatenda NTT (2013) dan yang paling akhir adalah Erupsi Gunung Kelud dan Gunung Sinabung (2014). Pasca erupsi biasanya diikuti dengan banjir lahar dingin. Manrut (Bappenas dan BNPB, 2010), Potensi aktivitas gunung api pada masa datang yang

perlu mendapat perhatian adalah Gunung Merapi, Semeru, Soputan, Karangetang, Ibu, Talang, Batur, dan Lokon.

Fenomena alam seperti letusan (erupsi) gunung api yang melontarkan semburan awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, lumpur panas, aliran lahar, dan/atau gas beracun, pasir, kerikil bahkan batu besar telah berulang kali terjadi. Fenomena alam seperti ini telah berulang kali terjadi dan berdampak negatif (bencana) yakni kerugian harta benda bahkan nyawa bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api tersebut. Ketika Erupsi Merapi 2010 Pemerintah Kabupaten Sleman mengungkapkan, Sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 jumlah korban meninggal mencapai 277 orang (Sleman, 2010)

Wilayah Lereng Merapi bagian selatan (berada di wilayah pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta) yang dikategorikan sebagai Kawasan Rawan Bencana² (KRB) adalah:

1. Wilayah KRB III: di Kecamatan Cangkringan meliputi Desa Glagaharjo (Dusun Srunen, Singlar, Ngancar, Besalen), Desa Kepuharjo (Dusun Jambu, Petung, Kopeng, Batur, Pagerjuran, Kepuh, Manggong), Desa Umbulharjo (Dusun Gondang, Gambretan, Balong, Plosorejo, Karanggeneng, Plosokerep, Pentingsari)
2. Wilayah KRB II di Kecamatan Pakem meliputi Desa Hargobinangun (Dusun Kaliurang Barat & Timur, Ngipiksari, Boyong), Desa Purwobinangun (Dusun Ngepring, Kemiri, Jamblangan, Glondong).

1. Dalam lampiran I Peraturan Menteri Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung api, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami, dijelaskan bahwa Kaawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung api adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerawanan dibagi dalam 3 kategori yakni: KRB I, merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhnya berupa hujan abu, dan/atau air dengan keasaman tinggi. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan tertimpa material jatuhnya berupa hujan abu lebat, serta lontaran batu pijar; KRB II, merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan/atau gas beracun; dan KRB III merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan/atau gas beracun

Desa dan dusun pada KRB II di Kecamatan Turi meliputi Desa Girikerto (Dusun Nganggiring, Keloposawit, Kemirikebo, Sokorejo), Desa Wonokerto (Dusun Gondoarum, Sempu, Ledoklempung, Manggungsari).

3. Wilayah KRB I terdiri dari: Sepanjang aliran sungai Gendol dan Opak, sungai Boyong disebelah hilir disebut sungai Code, sungai Krasak dan Sungai Kuning.

Masyarakat lokal (penduduk asli) telah hidup sejak ratusan tahun lebih hingga saat ini. Lereng Merapi merupakan sumber daya alam melimpah yang potensial untuk pengembangan pertanian, kebudayaan dan pariwisata. Masyarakat telah menggantungkan kehidupannya dari sumberdaya alam Gunung Merapi. Sumber mata air, tambang pasir dan batuan (sirtu), kesuburan tanah untuk pertanian, pesona keindahan alam dan budaya yang ada telah menjadi sandaran hidup masyarakat. Kondisi alam seperti inilah yang dijadikan dasar pertimbangan untuk tetap mempertahankan wilayahnya. Meskipun wilayah tersebut telah dikategorikan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB). tetap bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya di lingkungan tersebut.

Lereng gunung merapi merupakan wilayah yang tetap menarik bagi masyarakat (termasuk masyarakat dari luar Yogyakarta). Bagi masyarakat yang berasal dari luar Yogyakarta, lingkungan lereng gunung Merapi berpeluang untuk pengembangan usaha. Kondisi ini tercermin dari perkembangan perumahan, pertokoan dan hotel disepanjang jalan Kaliurang (jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta ke Desa Kaliurang/lokasi wisata di lereng Gunung Merapi) dan sekitarnya. Perkembangan seputar Merapi menjadi lebih cepat terutama sejak pengembangan kampus Universitas Islam Indonesia di Pakem, dan

pengembangan wisata di Puncak Merapi. Selama satu dekade terakhir ini, permukiman penduduk semakin rapat di sekitar Lereng Merapi dan jumlah penduduk semakin padat.

Pendidikan dan Wisata yang ada di Merapi dan sekitarnya merupakan faktor determinan perkembangan kota. Meskipun diyakini bahwa erupsi Merapi pasti akan terjadi dan berbahaya bagi masyarakat di Kabupaten Sleman (entah kapanikan terjadi), namun lingkungan Lereng Merapi tetap menarik untuk lingkungan hunian dan kini semakin padat penduduknya. Sleman DI Yogyakarta, merupakan salah satu kota yang rawan erupsi Merapi. Menurut catatan PVMBG ada 28 daerah di Indonesia yang terancam letusan gunung api (Siswadi, 2012).

Persoalan yang menarik untuk dicermati adalah lereng Merapi dan lingklungannya adalah wilayah yang notabene telah dikategorikan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) tetap menarik untuk permukiman. Masyarakat tetap bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya di lingkungan tersebut. Bahkan selama satu dekade terakhir ini, perkembangan penduduk di sekitar Lereng Merapi semakin pesat. Oleh karena itu, areal dampak bencana (permukiman dan jumlah penduduk) semakin luas dan semakin besar. Kondisi ni mengisyaratkan bahwa tindakan antisipatif masyarakat dalam pengurangan risiko (jika sewaktu waktu terjadi bencana) semakin diperlukan. Menurut Jati (2013) pada masa depan, potensi risiko bencana akan kian membesar berkorelasi dengan modernitas peradaban manusia. Intinya adalah masalah penanggulangan bencana sendiri kini bukan lagi melakukan koordinasi penanggulangan bencana berbasiskan koordinasi dari pusat saja. Namun penanggulangan bencana sendiri memungkinkan komunitas masyarakat untuk lebih pro-aktif dalam masalah kebencanaan tersebut. Masyarakat lebih memiliki

pengetahuan bencana lebih baik daripada negara karena merekalah yang lebih tahu mengenai kondisi riil lingkungannya masing-masing.

Di Indonesia, penanggulangan bencana yang komprehensif (menyeluruh) telah dimulai terutama sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam ketentuan tersebut ada tiga aktor yang wajib berperan dalam penanggulangan bencana yakni Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Usaha. Dalam pengertian ini dapat dimaknai bahwa Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi beban pemerintah semata, tetapi penanggulangan bencana juga menjadi tanggungjawab seluruh unsur masyarakat yang ada.

Masyarakat merupakan salah satu aktor pertama dan utama dalam penanggulangan bencana. Kerangka berpikir yang paling sederhana adalah (1) Masyarakat adalah pihak yang berhadapan langsung terutama selama proses antisipasi (pra bencana), penyelamatan jika sewaktu waktu terjadi bencana sampai pada tahap pemulihannya (*recovery*); (2) selama tinggal di lokasi rawan bencana masyarakat mempunyai pengalaman empirik yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penanggulangan bencana; (3) masyarakat mempunyai nilai, pola perilaku dan keterampilan dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya yang dikonstruksi secara turun temurun. Artinya peran (partisipasi) masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang turut menentukan keberhasilan dalam pengurangan resiko bencana. Ditingkat lapangan, keberadaan masyarakat harus dijadikan sebagai basis.

Dari unsur kelembagaan (khususnya lembaga pemerintah) yang mempunyai

konsentrasi dalam penanggulangan bencana alam, secara khusus memang telah dilengkapi dengan seperangkat kebijakan, program dan anggaran baik melalui APBN maupun APBD. Persoalannya adalah, bagaimana kemampuan (potensi) masyarakat dalam penanggulangan bencana. Bagaimana pengalaman masyarakat selama berinteraksi dengan alam. Bagaimana masyarakat mengenal tanda tanda bencana. Bagaimana pemulihan yang dilakukan oleh masyarakat. Jawaban atas pertanyaan ini merupakan faktor penting dalam kerangka manajemen bencana yang komprehensif.

PEMBAHASAN

Hasil dari olah pikir terhadap pengalaman masa lampau ini tentunya akan membentuk pola perilaku bagaimana masyarakat tersebut berinteraksi dengan lingkungannya. Baik dalam pemanfaatan potensi maupun mengatasi masalah yang dihadapi. Apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Beberapa temuan tersebut dikemas masyarakat dalam bentuk pedoman (tidak tertulis) untuk kegiatan sehari-hari bahkan tidak jarang dijadikan sebagai tradisi, kearifan lokal atau kebudayaan.

Berbagai istilah untuk yang berkaitan dengan temuan dari olah pikir dan perilaku masyarakat selama berinteraksi dengan masyarakat. Sebutan dimaksud antara lain: (1) Tradisi. Menurut (Szompka, 2007) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran keyakinan, norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. Tradisipun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti ongkongan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini untuk membangunmasadepanberdasarkanpengalaman masa lalu. Tradisi menyediakan 'cetak biru' untuk

bertindak. Tradisi menyediakan mereka blok bangunan yang sudah siap untuk membentuk dunia mereka. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa tradisi daerah, kota, dan komunitas lokal sama peranannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu. Masyarakat yang ansih hanya menggunakan norma dan nilai (tradisi) dari leluhurnya seringkali disebut sebagai masyarakat tradisionil. (2) Kearifan lokal (*Local Wisdom*) atau disebut juga dengan istilah pengetahuan masyarakat lokal (*local knowledge, indigeneous people*). Menurut Jeniarto (2013), secara garis besar diandaikan terdapat dua pemaknaan *Local Wisdom*. Pertama, *Local Wisdom* dimaknai sebagai pengetahuan warisan leluhur yang diturunkan melalui tradisi. Pengetahuan ini bersifat permanen di dalam berbagai era. Kedua, *Local Wisdom* dimaknai sebagai pengetahuan lokal yang merupakan hasil dari kecerdasan lokal dalam menghadapi persoalan hidup. Pengetahuan ini senantiasa berubah sesuai lingkungan jaman. Pengetahuan ini bersifat kontekstual di dalam ruang dan waktu yang berbeda. Menurut Dekens (2007) *A local knowledge system is composed of different knowledge types, practices and beliefs, values, and worldviews. Such systems change constantly under the influence of power relations and cross-scale linkages both within and outside the community.* (3) Budaya, Menurut Koentjaraningrat, wujud kebudayaan ada tiga macam: 1) kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan; 2) kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat; dan 3) benda-benda sebagai karya manusia (Koentjaraningrat, 1974, p. 83).

Kearifan lokal adalah perangkat pengetahuan pada suatu guyuban (komunitas), baik yang berasal dari generasi-generasi masa lampau maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan guyuban lain untuk

memecahkan persoalan atau kesulitan yang dihadapi. Kearifan lokal dapat dikaji melalui kata-kata bijak yang secara turun temurun dipelajari dan menjadi tuntunan kehidupan. Kata-kata bijak yang khas berasal dari suatu keklompok etnik umumnya memanfaatkan salah satu alat kebahasaan utama yang disebut metafora. Mengapa disebut alat kebahasaan utama, karena metafora membuka kemungkinan bagi bahasa apapun untuk berkembang menjadi canggih sesuai dengan kebutuhan guyuban etniknya (Djawanai, 2011).

Uraian di atas menunjukkan antara Kearifan lokal, Tradisi dan Budaya mempunyai keterkaitan yang erat. Ketiganya mengandung unsur hasil olah pikir (ide/gagasan) berupa nilai yang mengatur perilaku manusia yang ada didalamnya untuk kebaikan. Dalam hal ini, Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Setiyadi (2013) mengungkapkan *In relation to 'culture', local wisdom is a part of abstract culture. Local wisdom can also be a symbol. The symbols can mean "good", "positive", "not good", "negative". In Indonesia, local wisdom must clearly have positive meaning because 'wisdom' always means 'good or positive'.*

Hasil olah pikir dari pengalaman panjang suatu masyarakat tersebut merupakan bukti bahwa di lingkungan masyarakat (mulai dari masyarakat yang paling primitif sekalipun) terdapat sumber informasi (nilai) untuk keselamatan bagi anggotanya. Dari bermacam istilah dari olah pikir dan karya tersebut mungkin yang akhir-akhir ini lebih banyak dijadikan bahasan khususnya dalam penanggulangan bencana adalah Kearifan lokal. Wikantiyoso (2010) mengemukakan bahwa masyarakat lokal umumnya memiliki pengetahuan lokal dan kearifan ekologi dalam memprediksi dan melakukan mitigasi bencana alam di daerahnya. Pengetahuan lokal tersebut biasanya

diperoleh dari pengalaman empiris yang kaya akibat berinteraksi dengan ekosistemnya. Terkait dengan pandangan ini (Ridwan, 2007) mengemukakan bahwa Kearifan lokal merupakan hasil proses dialektika antara individu dengan lingkungannya. Kearifan lokal merupakan respon individu terhadap kondisi lingkungannya. Pada aras individual, kearifan lokal muncul sebagai hasil dari proses kerja kognitif individu sebagai upaya menetapkan pilihan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi mereka. Pada aras kelompok, kearifan lokal merupakan upaya menemukan nilai-nilai bersama sebagai akibat dari pola-pola hubungan (*setting*) yang telah tersusun dalam sebuah lingkungan.

Kearifan lokal dalam Menjaga Lingkungan Hidup

Bagi masyarakat Lereng Merapi bagian Selatan, di Gunung merapi terdapat suatu kekuatan supranatural yang dapat berpengaruh pada kehidupan dan kehidupan bermasyarakat. Gunung Merapi mempunyai sebuah legenda atau mitos sebagai Kraton Makhluk Halus yang dikomunikasikan secara turun temurun oleh masyarakat disekitarnya. Salah satu tokoh yang dikenal dan dicintai oleh penduduk adalah Nyai Gadung Melati yang berperan sebagai pemimpin makhluk halus Merapi dan pelindung lingkungan di daerahnya.

Legenda atau mitos tentang keberadaan gunung api tidak hanya dijumpai di Yogyakarta, tetapi juga banyak dijumpai di negara yang sudah maju. Sebagai ilustrasi, beberapa legenda gunung tersebut antara lain: (1) Gunung Fujiyama di Jepang dengan Putri Kaguya yang dalam bahasa Jepang berarti anak perempuan yang bercahaya gemerlap. (2) Gunung Vesuvius kawasan Campagnia dekat Teluk Napoli yang berarti "Putra Ves/Zeus" alias Hercules, St. Helens yang dikenal sebagai 'Jembatan para

Dewa', (4) Mahameru yang dianggap sebagai tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi (manusia) dan Kahyangan. Dalam (Solopos.com, 2014), peradaban-peradaban besar dunia, gunung dianggap sebagai puncak pencapaian (rohani) kemanusiaan. Gunung adalah tempat tinggal arwah dan pusat kekuatan supranatural. Gunung adalah gerbang langit, tempat tertinggi manusia sebagai sosok berwujud, karena di atasnya manusia menjadi roh. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk piramida di Mesir, Gunung Mahameru di India, hingga Gunung Fujiyama di Jepang. Di kultur Jawa, representasi nilai itu mewujudkan dalam bentuk tumpeng, sajian nasi dan hasil bumi yang dibentuk mengerucut, simbolisasi kesatuan horizontal (manusia dan alam) serta vertikal (manusia dan penciptanya). Uraian ini mengisyaratkan bahwa tokoh-tokoh mitos dalam cerita masyarakat ini dipandang sebagai suatu yang sakral dan dapat dijadikan sebagai sebuah model yang memberikan makna dan nilai bagi perilaku pemilik mitos dalam pencapaian hidup harmoni dengan alam dan lingkungannya.

Dalam pencapaian kehidupan harmoni, masyarakat Jawa (khususnya masyarakat lereng Merapi) dilandasi suatu falsafah hidup Hamemayu Hayuning Bawono, Ambrasta dur Hangkara. Secara harafiah, Filosofi tersebut dapat ditafsirkan sebagai Memelihara keindahan dan keselamatan, kesejahteraan hidup di dunia serta memberantas sifat angkara murka, keserakahan dan ketamakan. Falsafah hidup Jawa ini merupakan pengejawantahan ajaran keutamaan hidup (piwulang/wewarah kautaman ing urip) yang mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan, Alam dan sesama manusia merupakan satu kesatuan yang utuh. Tugas utama manusia hadir di dunia ini adalah menjaga kelestarian alam dan lingkungannya (termasuk di dalamnya adalah

lingkungan sosial). Tugas manusia di dunia ini pada prinsipnya juga diajarkan dalam setiap agama. Sebagai ilustrasi agama samawi (agama yang bersumber dari Allah), meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Allah mempunyai tugas untuk memelihara alam.

Uraian di atas mengungkapkan upaya manusia di dunia untuk hidup selalu berdekatan dengan Alam. Menurut Kresna (2013) Orang Jawa memahami dunia dan ruang tempatnya berdiam sebagai entitas yang tidak terpisah dari kesadarannya. Bahkan bukan hanya menyatu dengan kesadarannya yang terbuka-ke-dalam, eksistensi manusia Jawa tertelan mentah-mentah oleh alamnya. Sehingga, alih-alih manusia Jawa memahami dirinya sebagai sebuah “*res cogitans*” yang mampu berefleksi tentang kesadarannya yang berjarak dengan ruang, kesadaran orang Jawa adalah bagian kecil dari ruang. Eksistensi manusia Jawa menyatu dengan alamnya, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan.

Berbagai bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap pelestarian alam ini tercermin dari berbagai upacara adat yang bertujuan untuk kelestarian alam. Sebagai ilustrasi, upacara adat Labuhan Merapi yang diselenggarakan Kraton Yogyakarta setiap tahun sekali. Upacara Adat Labuhan Merapi diselenggarakan di Dusun Kinahrejo, Umbulharjo, Cangkringan Setiap tanggal 30 Rejeb (bulan Jawa). Upacara adat ini merupakan manifestasi ungkapan syukur atas Jumenengan (Penobatan) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Labuhan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2013 merupakan upacara adat yang diselenggarakan pasca erupsi Merapi 2010 (Suryanto, 2013). Tujuannya adalah memohon keselamatan dari segala makhluk halus yang ada di Pulau Jawa untuk keselamatan pribadi Sri Sultan Hamengkubono, Karaton Yogyakarta dan rakyat Yogyakarta. Bagi warga Yogyakarta

dan sekitar Gunung Merapi, ketika upacara adat ini diselenggarakan, ribuan warga akan berbondong-bondong menapaki setiap prosesi. Mereka berjalan mengiringi para abdi keraton dengan membawa benda-benda labuhan untuk diserahkan kepada leluhur mereka.

Labuhan Merapi, merupakan upacara adat yang melibatkan seluruh unsur masyarakat DI Yogyakarta. kondisi ini tercermin dari ungkapan Ketua Paguyuban masyarakat Kinahrejo Badiman, kegiatan persiapan jalur dan lokasi sudah dilakukan sejak Febuari 2013 melibatkan sekitar 100 orang termasuk relawan berbagai komunitas. (Syaifullah, 2013). Selain upacara adat Labuan, di Jogyakarta juga dijumpai babarapa tradisi adat yang berkaitan dengan alam, yakni Merti Bumi, Sedekah Bumi, Merti Desa. Pada prinsipnya ritual adat ini merupakan ekspresi rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat dari Masyarakat Lereng Merapi.

Ritual yang berkaitan dengan Alam juga diselenggarakan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan secara kolektif dan dipandang penting (baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat). Upacara ritual dimaksud disebut Slametan, yakni kegiatan spiritual yang diselenggarakan untuk memperoleh ketentraman hidup lahir dan batin. Sebagai ilustrasi Ritual Wiwitan yang diselenggarakan oleh masyarakat petani. Ritual ini dilakukan agar kegiatan yang diselenggarakan dapat memperoleh hasil yang baik (sukses) dan mempunyai manfaat bagi seluruh warga (mendapat Berkah), serta terhindar dari masalah/gangguan (tolak balak). Wiwitan yang diselenggarakan penanaman atau panen padi padi dapat berfungsi sebagai perekat solidaritas warga desa dan pelestarian seni budaya Jawa. Dalam kerangka kerjasama wiwitan akan memberikan ruh nyambut gawe bebarengan (etos kerja secara kolektif/gotong royong).

Salah satu makna dibalik Upacara adat ini dapat dipandang pengenalan tentang Gunung Merapi dan fenomena yang dapat ditimbulkan kepada masyarakat (mitigasi bencana). Bencana alam beserta dampaknya merupakan suatu fenomena yang harus disikapi dengan bijak. Bencana bukan hanya akibat gerak alam tetapi juga dapat dipicu oleh ulah manusia yang alpa dalam memelihara lingkungan atau gabungan dari kedua faktor tersebut. Harapannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar semakin mencintai alam dan peka terhadap tanda-tandanya, dan selalu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dalam eksploitasi sumber daya alam.

Telaahan terhadap penyelenggaraan upacara adat di DI Yogyakarta, Fatkhan (2006) mengungkapkan Upacara ini merupakan suatu sistem ekspresi dan penafsiran yang terus menerus mengenai hubungan antara manusia, dunia dan kosmos. Masyarakat lereng Merapi masih mempercayai adanya kekuatan-kekuatan gaib yang dianggap lebih tinggi, sehingga berbagai upacara yang dilakukan oleh masyarakat, sebenarnya merupakan wujud upaya mereka untuk menjaga keselarasan antara penduduk, Gunung Merapi dan alam adi kodrati. Suwito (2005) meninjau dari sisi fungsi Upacara adat masyarakat Yogyakarta ada 3 (tiga) fungsi: (1) Fungsi Spiritual, Upacara adat memberikan petunjuk atau gambaran hubungan manusia dengan Tuhan (Hablun min Allah). Pada fungsi spiritual ini kepentingan rohani manusia akan terpenuhi; (2) Fungsi Sosial, Upacara adat melibatkan individu-individu warga masyarakat (Hablun min Annas) yang mempunyai kepentingan sama, yang dilandasi oleh kepercayaan dan keyakinan yang sama pula, sehingga dapat menciptakan kerukunan sosial dan membawa dampak terwujudnya ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan hidup; (3) Fungsi Pelestarian

Lingkungan Fisik/Alam. Dibalik konsepsi keyakinan yang tertuang dalam mitos-mitos dan upacara adat yang dianggap sakral dan keramat tersebut terkandung kearifan lokal yang dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pengelolaan lingkungan yang cukup efektif., sehingga masyarakat sendiri yang akan memperoleh manfaat ekologis yang cukup besar.

Hubungan antara masyarakat lereng Merapi dan lingkungannya sangat kuat, seolah keduanya tidak bisa dipisahkan. Suhartini (2009) mengungkapkan, mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami yang ada di Indonesia, dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Masyarakat pedusunan memiliki keunikan khusus seperti kesederhanaan, ikatan emosional tinggi, kesenian rakyat dan loyalitas pada pimpinan kultural seperti halnya konsep-konsep yang berkembang di pedusunan sebagai seluk beluk masyarakat Jawa. Kedekatan masyarakat dengan alam ini juga dikemukakan Koentjaraningrat (1985), Desa merupakan tempat tinggal mereka sejak lahir dan tumbuh berkembang juga merupakan tempat tinggal orang-orang dari nenek moyang mereka. Orang-orang ini relatif tidak suka berpindah karena itu sangat melekat pada desa kelahiran mereka. Untuk alasan itu, orang sering segan untuk mengevakuasi dan/atau terburu-buru untuk kembali pulang setelah diminta untuk menyingkir oleh otoritas setempat setelah terjadinya aktifitas gunung api.

Manifestasi kedekatan hubungan antara masyarakat dengan Merapi ini dapat diamati dari personifikasi Gunung Merapi seperti Merapi Sang Maha Guru, Eyang Merapi, atau istilah lain yang terkait dengan alam seperti Bopo angkoso Ibu pertiwi. Personifikasi ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk keyakinan

antara manusia dengan alam merupakan bagian yang utuh. Harmoni alam dan manusia dalam kehidupan sehari-hari nampak seperti dalam suatu keluarga besar. Istilah Merapi Sang Maha Guru ini juga telah dijadikan sebagai judul film yang disajikan kepada pengunjung di Museum Merapi di Yogyakarta. Menurut Krisanto (2011), Merapi sebagai bagian dari proses menyejarah warga lereng Merapi yang melahirkan budaya telah mampu membentuk watak adaptif dari warganya. Pilihan kalimat 'mampu hidup berdampingan' mewakili perasaan yang sudah berinteraksi dengan Merapi yang menyejarah. Interaksi yang turun-temurun memberi warisan kebijaksanaan ketika berhadapan dengan ganas dan ketidakganasan Merapi. Warisan kebijaksanaan yang menunjukkan penghayatan dan penghormatan terhadap Merapi muncul dalam penyebutan gunung Merapi dengan menggunakan istilah 'mbah'. Istilah ini menunjukkan keakraban bahkan keintiman dalam berinteraksi dengan Merapi. Mbah Merapi diyakini akan mengayomi atau tidak memberi penderitaan bagi warga di lereng Merapi.

Kedekatan masyarakat dengan alam ini juga tercermin dari etika masyarakat selama berinteraksi dengan alam seperti etika dalam bertani, etika dalam beternak, etika dalam bermukim. Setiap aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan pemilihan lahan untuk permukiman sampai serta pembangunan rumah selalu didahului dan diakhiri dengan ritual untuk memperoleh keselamatan. Etika tersebut selalu dijaga untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari terjadinya pengrusakan alam sekitarnya.

Manifestasinya adalah dimanapun manusia itu berada, pada dasarnya tidak akan terlepas dari ikatan hukum, meskipun aturan hukum yang berlaku di satu lingkungan belum tentu sama dengan lingkungan yang lain. Setiap

lingkungan (alam maupun sosial) di satu wilayah terdapat satu aturan yang mengatur bagaimana masyarakat (baik secara individu maupun sosial) harus berperilaku. Istilah yang sering disebut di lingkungan masyarakat adalah Desa mawa cara, negara mawa tata. Konteks ini dapat dipahami, bahwa aturan yang medasari perilaku masyarakat desa etika, tradisi dan atau adat, sedangkan aturan yang dipergunakan oleh orang kota (negara) diatur dengan perundang-undangan (hukum positif). Hal ini tidak berarti bahwa Jawa (khususnya masyarakat lereng Merapi) tidak terikat oleh hukum positif.

Dalam kerangka penanggulangan bencana yang menyeluruh, menjaga kelestarian alam dan lingkungannya merupakan salah satu bagian penting. Perilaku masyarakat diikat aturan (ketentuan tak tertulis) tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Masyarakat di lingkungan lereng Merapi masih meyakini ada perilaku yang harus dipantang (dihindari). Beberapa istilah pantangan untuk berperilaku antara lain pamali, tabu. Dalam istilah Jawa disebut wewaler, dan ora ilok (tidak pantas). Meskipun bagi yang melanggar pantangan tersebut tidak ada sanksi hukum yang secara tegas dinyatakan dalam bentuk aturan tertulis, namun masyarakat percaya jika ada diantara anggotanya yang melanggar larangan tersebut (Jawa: nerak wewaler), maka pelanggaran ini akan dapat berdampak buruk (Jawa: keno sengkala, kesiku/kualat atau kena kutukan dari sesuatu yang dijadikan mitos) bagi diri pelaku maupun lingkungannya (lingkungan sosial dan alam). Perilaku yang harus dipantang antara lain: berkata kata yang tidak baik atau jorok (beberapa istilah yang tidak boleh dikemukakan ketika terjadi erupsi seperti wedus gembel, Merapi mengamuk, Merapi mbledos), mencabut tanaman apalagi pengrusakan lingkungan. Menurut Fatkhan (2006) Masyarakat lereng Merapi juga masih percaya

bahwa barang siapa yang melanggar hukum alam, akan mendapat hukuman dari masyarakat atau dari kosmis yang lebih tinggi yang berasal dari alam adi kodrati. Dengan keyakinan inilah keselarasan antara masyarakat lereng Gunung Merapi dengan alam lingkungannya dapat berjalan dengan penuh keseimbangan.

Istilah pantangan atau pamali yang sering dipergunakan oleh masyarakat Jawa adalah Gugon tuhon yakni semacam larangan (pepali). Informasi tentang gugon tuhon umumnya disosialisasi dalam keluarga dari orangtua yang lebih tua kepada anak/cucu. (Padmosoekotjo, 2009) Gugon Tuhon yang berisi wasita sinandhi ini adalah nasihat yang tersamar (nasihat yang dirahasiakan) supaya anak atau orang lain yang diberi nasihat dapat mentaatinya. Nasihat itu tidak disampaikan berterus terang, tetapi disembunyikan dan digantikan dengan nasihat yang lebih bersifat ancaman atau menakutkan. Pesan tentang perilaku untuk “bersahabat dengan alam” ini telah disampaikan sejak ratusan tahun yang lalu baik melalui keluarga, wayang, tembang (macapat), maupun beberapa tokoh masyarakat. Gugon Tuhon ini juga dikonstruksi di lingkungan masyarakat lereng Merapi.

Mitos tidak hanya dipercaya di lingkungan masyarakat tradisional tetapi juga masyarakat di negara maju dan modern. Sebagai ilustrasi mitos tentang angka 13 yang seringkali membawa sial, sehingga penggunaan angka tersebut harus dihindari. Analoginya adalah Mitos dan berbagai pantangan yang disebut sebagai pepali, waler, pamali yang dapat berdampak buruk (kutukan) bagi pelanggar maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas dapat dipandang sebagai salah satu strategi pelestarian alam. Informasi ini mengindikasikan bahwa masyarakat penganut Mitos adalah masyarakat yang berpikir kritis tentang penyelamatan alam untuk masa yang akan datang. Sosialisasi nasihat yang

tersembunyi bukan ungkapan sikap ketidak-terbukaan masyarakat Jawa tetapi sebagai salah satu strategi pembelajaran kepada anak cucu untuk peka terhadap apa yang tersirat dalam nasihat tersebut.

Dalam kerangka pelestarian alam dan penyelamatan Bumi, konsep “Memayu Hayuning Bawono” telah dikonstruksi di lingkungan masyarakat Jawa sejak ratusan tahun silam. Hal ini menunjukkan bahwa upaya masyarakat Lereng Merapi bukan bagian dari euphoria negara negara di dunia dalam penyelamatan bumi selama tiga dekade 1980-2010 seperti Gerakan kesadaran seperti Go Green, Blue Sky, kewajiban pelaku bisnis untuk memperhatikan 3P (*Profit, People, and Planet*) dalam menjalankan bisnisnya. Perhatian masyarakat dunia dalam pelestarian alam ini juga tercermin dari beberapa agenda dunia seperti *United Nations Conference on Human Environment* (UNCHE) di Stockholm 1972, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro 1992, KTT Pemanasan Global di Nusa Dua, Bali – Indonesia tahun 2007. Dalam kerangka pendidikan penyelamatan bumi, Pusat Unggulan Regional atau Regional Center Expertise of Yogyakarta (RCE-Yogyakarta) UGM bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan United Nation University menyelenggarakan Konferensi Pusat-pusat Regional Ahli ESD (*Education for Sustainable Development*) tentang upaya penyelamatan bumi melalui pendidikan di negara-negara Asia Pasifik, tanggal 12-15 Januari 2011 bertempat di Sekolah Pascasarjana UGM (Gusti Grehenson, 2011)

Kearifan Lokal dalam Mengenal Peringatan Bencana

Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, akurasi dari peringatan bahaya bencana (deteksi dini) merupakan salah

satu faktor penting. Perangkat pemantau aktivitas gunung Merapi dan perangkat komunikasi serta sumber daya manusia untuk operasionalisasi dari perangkat tersebut sudah disiapkan. Perkembangan ilmu dan teknologi dan globalisasi informasi telah berusaha untuk memberikan jawaban dan memberikan kontribusi bagi keterbukaan pengetahuan masyarakat terhadap alam. Masyarakat dapat mengetahui informasi tentang kondisi kerawanan wilayahnya dari media (cetak dan elektronik). Kondisi terkini tentang gunung Merapi dan dimana seseorang itu berada pun juga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pengungkapan tanda tanda bahaya gunung Merapi (peringatan dini) dengan penjelasan ilmiah memang telah banyak dilakukan dan akurasi hasil analisisnya pun lebih baik. Namun dalam praktik di tengah masyarakat juga mempercayai sistem peringatan dini dan informasi tentang tanda tanda bahaya yang telah dikonstruksi secara turun temurun. Dalam penanggulangan bencana di lereng gunung bagian selatan, terdapat suatu hal yang penting yakni (1) peran Kraton Yogyakarta dan (2) pengetahuan dan pengalaman masyarakat (lokal).

Peran Kraton Yogyakarta dalam pemantauan kondisi gunung Merapi adalah penugasan Abdi Dalem Kraton yang dikenal sebagai Juru Kunci (Kuncen). Salah satu kuncen Merapi yang sangat dikenal masyarakat luas adalah Raden Ngabehi Surakso Hargo atau Mbah Maridjan yang meninggal pada saat terjadi erupsi Merapi tanggal 26 Oktober 2010. Tugas khusus juru kunci adalah sebagai wakil Keraton (Pengemban amanah Sri Sultan Hamengkubuwana IX) dalam melaksanakan upacara ritual di puncak Merapi, memantau aktivitas gunung Merapi, dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengkomunikasikan informasi yang didapat

dari leluhur maupun hasil pantauannya kepada masyarakat serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan beradaptasi dengan alam.

Satu hal yang menarik jika terjadi kondisi bahaya erupsi Merapi adalah cara penyampaian pesan Juru kunci kepada masyarakat dengan menggunakan personifikasi gunung Merapi. Sebagai ilustrasi Juru kunci tidak menyebut "Merapi akan meletus", melainkan "Eyang lagi Merapi ewuh, ojo cedhak-cedhak, lan ojo ngrusuhi" (secara harfiah dapat diterjemahkan: Merapi sedang punya hajat/kerja, jangan mendekat, dan jangan mengganggu). Ungkapan ini mengisyaratkan kepada masyarakat (khususnya masyarakat lereng Merapi) untuk segera meninggalkan permukiman atau menjauhi gunung yang sedang bergejolak dan masyarakat tidak diperkenankan beraktivitas (baik sosial maupun ekonomi) di sekitar Merapi (Gunawan, 2014). Meskipun pesan tersebut tidak diungkapkan secara lugas, namun masyarakat lereng Merapi sudah dapat memahami perintah tersebut. Dalam manajemen bencana, isyarat tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk simbol peringatan dini (*early warning*) kepada masyarakat

Dari pengalaman erupsi Merapi yang telah terjadi berulang kali, masyarakat Lereng Merapi umumnya memiliki pengetahuan dan kearifan ekologi dalam memprediksi dan melakukan mitigasi bencana alam di daerahnya. Pengetahuan lokal tersebut biasanya diperoleh dari pengalaman empiris yang kaya akibat berinteraksi dengan ekosistemnya (Wikantiyoso, 2010). Fenomena yang dijadikan perhatian masyarakat lereng Merapi tidak hanya terbatas pada pengamatan terhadap aktivitas gunung, tetapi termasuk didalamnya adalah pengamatan terhadap flora dan fauna yang ada di sekitarnya dalam menghadapi gejolak alam). Masyarakat Jawa menyebut Pengamatan

terhadap fenomena alam ini dengan istilah Titen atau dikenal dengan Ilmu Titen yang secara harafiah dapat diartikan sebagai teliti dan mengingat-ingat suatu fenomena yang berpengaruh terhadap kehidupan dan penghidupan bermasyarakat. Beberapa hal yang umumnya dijadikan perhatian antara lain: benda, tempat, peristiwa, perilaku binatang, peristiwa/kejadian yang berulang pada alam, hubungan antar manusia (apa yang harus diingat, dimana lokasinya, kapan peristiwa itu terjadi). Menurut (Gunawan, 2014) Istilah Titen dapat dimaknai sebagai suatu perilaku yang selalu memperhatikan fenomena alam (Merapi), lingkungan alam Merapi, dan kehidupan masyarakatnya dari waktu ke waktu. Meskipun catatan dari hasil titen tersebut tidak banyak dijumpai di masyarakat namun ada satu mekanisme diskursus tentang hasil titen baik melalui pengampu maupun keluarga secara turun temurun.

Dari pendekatan Titen, minimal ada dua fenomena penting yang dijadikan pengamatan untuk mengetahui tanda tanda bahaya. Pertama, perilaku binatang, yakni migrasi binatang (turun gunung) binatang yang karena terusik. Binatang akan bergerak mencari tempat yang paling nyaman dengan insting yang dimiliki. Jika binatang tersebut merasa terusik (tidak aman), maka binatang tersebut akan mencari tempat lain yang lebih nyaman. Aspek yang dapat mengganggu kenyamanan binatang tersebut antara lain suhu udara (cuaca), suara (kegaduhan). Binatang akan meninggalkan pengunungan apabila ada perubahan suhu udara yang cenderung ekstrem melampaui ambang batas untuk kehidupan (baik semakin panas maupun semakin dingin). Binatang juga akan pergi jika ada suara berisik yang asing

misalnya kegaduhan suara penebangan kayu di hutan (Gunawan, Roebiyanto, H., Sugiyanto, dan Murni, R, 2007). Kedua, Kondisi flora (tanaman), gejala yang dapat diamati dari tanaman tersebut adalah “daun layu” pada perubahan perubahan cuaca tersebut, atau tanaman keras yang sudah mulai miring sebagai penahan erosi atau tanah longsor. Informasi ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah mengenal tentang beberapa tanda alam ketika akan terjadi gerak alam.

Perilaku titen memang telah memberikan kontribusi besar bagi kemaslahatan umat manusia terutama masyarakat yang berada di lereng Merapi. Namun, seiring dengan terjadinya perubahan alam (misalnya pemanasan global) yang telah berpengaruh pada perubahan iklim. Persoalannya adalah bagaimana ketepatan prediksi perilaku titen ditengah perubahan alam tersebut. Sebagai ilustrasi, fenomena alam yang tidak masuk dalam perhitungan/prediksi cuaca (pranoto mongso) seperti turunnya hujan di musim kemarau atau sebaliknya kemarau di musim hujan. Fenomena seperti ini disebut masyarakat setempat sebagai “udan Salah mongso” yang seringkali berdampak pada kegagalan panen. Analog dengan uraian ini, persoalannya adalah bagaimana jika pendekatan yang digunakan masyarakat lokal ini mengalami hal yang sama atau salah prediksi dalam mengantisipasi bencana.

Dalam kondisi bahaya, masyarakat menggunakan kentongan⁴ sebagai salah satu perangkat tradisional untuk penyampaian informasi. Pada umumnya keluarga yang bermukim di Lereng Merapi mempunyai kentongan. Di era perkembangan ilmu dan teknologi informatika, Kentongan tersebut

2. Dalam kondisi bahaya, kentongan (dipukul) secara terus menerus dan secepat cepatnya yang disebut Titir (Jawa). Seluruh warga diperbolehkan membunyikan kentongan dengan irama Irama titir dalam kondisi (1) darurat terutama mereka yang membutuhkan pertolongan segera; (2) untuk memberitahukan kepada seluruh warga jika di wilayahnya terjadi ancaman yang membahayakan seluruh warga misalnya kebakaran, bencana alam, kejahatan..

telah mulai berkurang pemanfaatannya. Untuk pemantauan bahaya, alat komunikasi tradisional tersebut telah diganti dengan *handy tolky* (HT) dan telepon genggam (*handphone*/HP). Dalam upaya penyelamatan bencana, HT dan HP lebih efisien untuk penyampaian informasi dari pada Kentongan. Namun dari sisi psikologis, Kentongan mempunyai pengaruh psikologis lebih besar untuk memobilisasi masyarakat jika sewaktu waktu terjadi bencana.

Kearifan Lokal dalam Pemulihan

Pengejawantahan manusia di dunia dapat dipahami sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dan religius. Ketiganya mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Manifestasi dari kuatnya hubungan ini tercermin dari setiap kegiatan selalu berkaitan dengan ketiga unsur tersebut.

Sebagai makhluk sosial, masyarakat Lereng Merapi dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya adalah masyarakat yang masih mempunyai ikatan kekeluargaan yang sangat kuat dan menjunjung tinggi kebersamaan, tolong menolong dan saling bekerjasama. Tolong menolong dan gotong-royong masyarakat merupakan nilai yang masih terjaga dengan baik. Koencaraningrat (1984, hal. 11) mengungkapkan contoh dari suatu nilai budaya dalam masyarakat kita, adalah konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar. Konsep ini yang biasanya kita sebut dengan nilai gotong-royong, mempunyai ruang lingkup yang luas karena memang hampir semua karya manusia itu biasanya dilakukan dalam rangka kerjasama dengan orang lain. Uraian ini mengisyaratkan bahwa kerjasama merupakan suatu kekuatan besar untuk mempercepat pemulihan (baik pemulihan fungsi lingkungan maupun pemulihan korban bencana).

Gotong royong dalam terminologi lokal (Jawa) dimaknai sebagai Nyambut Gawe bebarengan. Berbagai istilah lain yang mempunyai makna kerjasama atau Gotong royong yang ada di masyarakat antara lain: Kerja bakti, Gugur gunung, Sambatan. Di era sekarang ini istilah kerjasama yang paling populer digunakan adalah kerja bakti atau disebut juga dengan istilah gotong royong. Secara umum kedua istilah tersebut merupakan padanan kata yang bermakna bekerja sama tanpa imbalan. Sebagai sebuah tradisi, aktivitas gotong royong dapat ditemukan pada semua masyarakat di berbagai daerah Indonesia, bahkan gotong royong ini merupakan salah satu unsur dari karakteristik bangsa. Kondisi ini tercermin dari aktivitas masyarakat menjelang acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Gotong royong ini diselenggarakan di lingkungan masyarakat baik di desa maupun di kota. Pada prinsipnya gotong royong dilakukan untuk memecahkan persoalan lingkungan.

Di era industrialisasi dan globalisasi, Kerjasama (gotong royong) yang terbangun dalam masyarakat telah mengalami perubahan (lebih terkonsentrasi pada kebersihan lingkungan). Khususnya di lingkungan masyarakat desa, penyelenggaraan gotong royong tidak hanya terbatas untuk kepentingan kolektif, tetapi termasuk di dalamnya adalah untuk kepentingan yang bersifat individual. Menurut Soetomo (2012), implementasi kegiatan kerjasama untuk kepentingan umum/bersama dan kepentingan individu. Dalam kerangka Gotong royong untuk kepentingan umum, Soetomo mengungkapkan contoh istilah Gugur Gunung yang dilakukan oleh masyarakat. Gugur gunung merupakan pengerahan tenaga secara besar-besaran untuk membangun objek yang merupakan kepentingan bersama dengan mengerahkan seluruh tenaga kerja tanpa memandang kelas sosialnya. Penyelenggaraan

gotong royong ini seringkali dikaitkan dengan hari dan atau tanggal tertentu yang dipandang mempunyai penting bagi masyarakat di satu wilayah, misalnya peringatan tentang hari terbentuknya nama desa, peringatan terhadap tokoh (legenda), atau hari yang mempunyai nilai sakral bagi masyarakat. Terkait dengan pandangan ini Widodo (2012) mengemukakan “Gugur Gunung” merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Pedesaan di Jawa secara bersama-sama dalam hal pekerjaan yang kaitannya dengan fasilitas umum. Misalnya membersihkan selokan, membuat jalan setapak, membuat jembatan desa, bersih-bersih lingkungan dan sebagainya. “Gugur Gunung” dilakukan pada hari minggu atau hari libur dan pada hari-hari tertentu, misalnya menjelang Bulan Suci Ramadhan, menjelang HUT RI dan lain-lain. Biasanya “Gugur Gunung” dilakukan secara berkelompok dalam satu RT, RW, bahkan satu kampung.

Penyelenggaraan Gotong royong untuk memenuhi kebutuhan individu dikenal di lingkungan masyarakat Jawa dengan istilah sambatan. Secara harafiah, istilah ini dapat dikonotasikan seseorang yang ingin meminta pertolongan kepada orang lain (tetangga). Menurut Soetomo (2012), pilihan kata sambatan (sambat-sinambat) atau sumbangan (sumbang-menyumbang) memberikan makna saling, yang berarti penerapan dari azas resiprokal. Sebagai contoh, sambatan untuk membangun rumah yang sebenarnya merupakan kepentingan pribadi. Dalam peristiwa itu warga yang lain akan datang membantu baik tenaga maupun bentuk yang lain. Dalam kegiatan ini pihak yang mempunyai hajat berkewajiban untuk menyediakan jamuan. Hal yang sama akan dialami oleh warga lain jika pada suatu saat memiliki hajat.

Goyong royong untuk kepentingan individu (Sambatan) yang terjadi di lingkungan

masyarakat ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam pelayanan sosial bagi setiap anggota masyarakat dengan mengandalkan kekuatan yang ada di masyarakat. Menurut Ife, J. dan Toserio, F. (2006, p. 218-219) mengemukakan bahwa penempatan tanggung jawab primer untuk penyediaan layanan pada masyarakat lokal berarti bahwa sebuah masyarakat harus menggunakan kekuatan-kekuatannya sendiri dalam hal sumber daya manusia, keahlian dan seterusnya. Layanan akan dirancang dan diberikan oleh dan untuk anggota masyarakat lokal, ketimbang dirancang dan diberikan oleh teknisi-teknisi ahli dari tempat lain. Pengalaman pribadi, pengetahuan lokal, pengertian dan kearifan menjadi sangat dihargai, sedangkan negara kesejahteraan secara afektif mengecilkan nilai-nilai tersebut untuk kepentingan keseragaman terpusat yang anonim.

Nilai kebersamaan (gotong-royong) tersebut hingga kini masih terjaga dengan baik yang dapat diimplementasikan di setiap saat. Dalam kerangka pemecahan masalah sosial, kerjasama ini dapat berfungsi sebagai modal sosial. Menurut Field (2010: 230) mengemukakan bahwa Modal sosial bisa disebut dengan modal selama hal ini melahirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan aktor – individu dan kelompok – untuk mencapai tujuan mereka secara lebih efektif dari pada mereka melakukan tanpanya. Nilai gotong royong yang ada di dalam masyarakat ini juga dapat dimaknai sebagai sumber energi sosial. Menurut Soetomo (2012:115) Sumber energi sosial dalam masyarakat berupa nilai kemandirian, solidaritas, kesadaran kolektif, tanggung jawab sosial yang mendorong terwujudnya tindakan bersama. Tidak dapat diingkari bahwa setiap orang sebagai individu mempunyai aspirasi, kepentingan yang dapat berbeda dengan orang lain sesama warga

masyarakat. Kunci terpeliharanya energi sosial adalah adanya komitmen bersama dan kesadaran akan tujuan bersama. Jadi gotong royong masyarakat ini juga diberlakukan dalam kerangka penanggulangan bencana.

Gotong royong sebagai sebuah nilai pada prinsipnya dapat diselenggarakan untuk berbagai tujuan di berbagai bidang. Fleksibilitas dari nilai gotong royong ini juga telah diangkat oleh Haryadi Suyuti dalam *MENA Urbanization Knowledge Platform Conference*, Marseille, Prancis 22-23 Mei 2014. Dalam pertemuan ini Suyuti (2014) mengungkapkan *The value of social capital in the community which becomes potential in Yogyakarta is mutual cooperation. At normal conditions, the spirit of mutual cooperation is realized in social activities, social interaction, and the implementation of development environment.....At the time of a disaster, the rescue and recovery measures will be implemented and achieved well by utilizing aspects of value of local wisdom such as mutual cooperation. The communities cooperate and recover together, repair, and rebuild from the impacts of disaster.*

Beberapa pandangan di atas merupakan bukti bahwa di tengah masyarakat terdapat suatu kekuatan besar baik untuk mengatasi persoalan yang bersifat individual maupun kepentingan kolektif. Sebagai modal sosial maupun energi sosial yang ada di tengah masyarakat, implementasinya sangat ditentukan oleh masyarakat (sebagai pemilik modal sosial atau energi sosial). Artinya masyarakat mempunyai otonomi untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, tujuan gotong royong, dimana lokasi yang akan dijadikan sasaran aktivitas gotong royong, kapan mulai dan berakhirnya gotong royong. Uraian ini juga mengindikasikan bahwa gotong royong adalah kegiatan yang terencana, bukan hanya sekedar kegiatan spontanitas warga masyarakat. kondisi ini tercermin dari

penyelenggaraan Musyawarah Desa atau dalam terminologi disebut dengan Rembug Desa (Jawa) yang dihadiri oleh tokoh masyarakat. Hasil Rembug Desa tersebut disosialisasi melalui pertemuan rutin desa. Umumnya pertemuan rutin desa diselenggarakan setiap 35 hari sekali (selapan:Jawa) dan jatuh pada hari yang sama. Perhitungannya ditentukan dengan perkalian jumlah hari (7) dan hari pasaran Jawa (5). Dalam konteks ini, pertemuan rutin yang diselenggarakan di desa disebut Selapanan Desa, sedangkan pertemuan yang diselenggarakan di dusun disebut dengan Selapanan Dusun. Seluruh warga diharapkan hadir dalam acara rutin tersebut dan mempunyai kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan.

Telaahan terhadap kegiatan kolektif masyarakat lereng merapi tersebut, dapat dikemukakan bahwa di lingkungan masyarakat lereng Merapi terdapat satu mekanisme dalam manajemen pengelolaan sumber daya manusia yang telah terbangun cukup lama dan efektif. Dari pertemuan (rembug desa) yang sudah ditentukan secara berkala seluruh warga dapat mengetahui persoalan yang ada di desa. Dalam menyikapi tindakan kolektif (saat perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatannya) seluruh warga juga diberikan kesempatan untuk berkontribusi/berpartisipasi. Kontribusi masyarakat Menurut Ndraha (1990) bentuk-bentuk partisipasi dapat dikelompokkan dalam 5 bentuk dukungan, yakni: 1) partisipasi buah pikiran, 2) partisipasi keterampilan, 3) partisipasi tenaga, 4) partisipasi harta benda, 5) partisipasi uang.

Dari perspektif sosiologi, di dalam gotong royong terdapat kesadaran kolektif untuk melakukan aktivitas bersama, interelasi, ikatan sosial, dan pengorbanan. Dalam kerangka penyelenggaraan gotong Royong tersebut, Soetomo (2006, hal.388) mengungkapkan bahwa dalam kehidupan masyarakat pada tingkat komunitas lebih mudah diorganisasikan

berbagai bentuk tindakan bersama, termasuk tindakan bersama untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat secara individual apalagi kebutuhan kolektif. Hal itu disebabkan karena pada tingkat komunitas masih lebih kental dirasakan adanya kesadaran kolektif, solidaritas sosial dan kepentingan bersama. Dengan demikian, apabila masyarakat lokal memiliki komitmen tentang suatu gagasan sebagai bentuk prakarsa dan kreativitas dari dalam, mereka akan berusaha untuk memobilisasi sumber daya yang ada melalui tindakan bersama guna merealisasikan gagasan tersebut.

Gotong royong dapat berfungsi sebagai (1) wahana interaksi sosial warga tanpa memandang kelas sosial akan mempererat kohesifitas antar warga. Visi yang ditanamkan di lingkungan masyarakat Jawa adalah *Saiyek Saeko Proyo*. Secara harafiah Visi ini dapat diterjemahkan sebagai satu hati, satu keinginan, dan satu tekad untuk bersama-sama membangun masyarakat. Implementasi gotong royong masyarakat dalam mengatasi masalah humaniora yang tidak hanya sebatas pada gotong royong di kampung sendiri, tetapi juga dilakukan untuk kampung lain yang terkena musibah seperti penanggulangan bencana alam; (2) wahana pengembangan dan penyebaran pengetahuan kepada masyarakat. selama aktivitas berlangsung seringkali dijumpai “diskusi” diantara mereka, bahkan selama diskusi tersebut sering dijumpai adanya *thesa* dan *antithesa* yang menghasilkan *sinthesa* dalam memecahkan suatu persoalan versi (ala) masyarakat setempat. Akumulasi pengetahuan masyarakat yang didapat dari diskusi tersebut tentunya masyarakat ini tentunya akan memperluas cakrawala pengetahuan masyarakat; (3) Seluruh warga dapat mengenal kondisi wilayahnya lebih baik; (4) wahana pembelajaran kepada masyarakat untuk ikhlas berkorban (tanpa imbalan).

Dari aspek ekonomi: Selama

penyelenggaraan aktivitas Gotong Royong, masyarakat tidak pernah menghitung berapa besar dukungan (tenaga, pikiran, harta benda, keterampilan, dan dana) yang diberikan. Jika dukungan masyarakat tersebut dinilai dengan uang, misalnya dihitung dengan nilai rupiah satu orang satu hari kerja sebesar Rp.75.000,- dan warga yang bergotong royong tersebut sebanyak 100 orang selama dua hari, maka dana yang dialokasikan untuk gotong royong minimal mencapai Rp.15.000.000,-. Dana ini belum termasuk sumbangan warga dalam bentuk makanan dan minuman yang harus disediakan. Analogi dari hitungan ini, gotong royong masyarakat yang melibatkan ribuan orang dalam pemulihan (misalnya gempa Bantul dan erupsi Merapi) akan mempunyai nilai rupiah yang sangat besar.

Dari aspek sosial maupun ekonomi tersebut menunjukkan betapa kuatnya nilai gotong royong untuk mengatasi persoalan masyarakat. Sebagai modal sosial. Gotong royong juga mempunyai fleksibilitas yang tinggi karena penyelenggaraannya akan selalu disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat, yakni untuk memecahkan persoalan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai makhluk religi, masyarakat percaya bahwa yang menempati lingkungan lereng merapi tidak hanya manusia. Masyarakat harus berperilaku saling menghargai dan tidak saling mengganggu. Hal ini dapat diamati dari setiap even (baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kolektif) selalu diringi dengan ritual. Fenomena ini dapat diamati dari (1) ritual untuk keselamatan anak (dari lahir sampai akhir hayatnya), menentukan dan membangun tempat tinggal, (2) ritual yang diselenggarakan pada setiap even untuk kegiatan kolektif seperti Ritual Wiwitan untuk menggarap sawah, Bersih desa. Dari aspek sosial, ritual tersebut dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya

untuk peningkatan solidaritas antar warga masyarakat. Setiap anggota masyarakat saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling melengkapi.

Dalam kerangka menjalani kehidupan, kepasrahan dan keikhlasan telah dijadikan sebagai suatu tuntunan atas kondisi faktual yang sedang terjadi. Pasrah dan ikhlas bukan berarti apatis pasif yang tidak memandang masa depan tetapi juga dapat dipahami sebagai ungkapan bersyukur. Fenomena tentang Kepasrahan dan keikhlasan masyarakat dalam menghadapi bencana pada pendekatan tradisional teologis seringkali dimaknai sebagai salah satu manifestasi dari sikap masyarakat yang pasif, apatis, atau fatalis oleh penganut pendekatan yang berbasis IPTEK. Namun disisi lain pendekatan ini mempunyai sisi positif terutama untuk pemulihan sosial bagi korban bencana. Menurut Jalaludin (1999) pendekatan religi merupakan salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan untuk untuk menanggulangi masalah individual. Dalam pendekatan ini Jalaludin mengilustrasikan bahwa musibah dipahami sebagai suatu ujian Allah. Hampir semua orang saleh pernah diuji Allah lewat pelbagai musibah. Semua ujian ini untuk mengetahui iman manusia. Makin berat ujian yang Anda terima makin tinggi iman Anda. Secara psikologis, Ilustrasi ini mengindikasikan bahwa kepasrahan dan keikhlasan masyarakat ini merupakan modal yang berpotensi besar untuk pemulihan kondisi ketakutan, trauma, dan stress karena resiko bencana yang dialami cukup besar. Sosialisasi nilai dan norma yang terkait dengan kelestarian alam sampai dengan bagaimana menghadapi bencana telah dijadikan sebagai salah satu hal penting baik yang diajarkan secara terus menerus baik oleh adat dan agama maupun Pemerintah. Pada prinsipnya, praktik pendekatan tradisional (religi) ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik

oleh teman, saudara, kerabat maupun orang yang mempunyai kepedulian terhadap masalah yang dialami individu, tanpa harus menunggu kehadiran seorang profesi seperti tokoh agama, psikolog, maupun pekerja sosial. Setiap individu mempunyai kekuatan akan berusaha untuk saling membangkitkan individu yang lain dalam keterpurukan. Kekuatan individual ini tercermin dari ungkapan Abot enteng disonggo bareng. Ungkapan masyarakat ini sebagai filosofi masyarakat Jawa yang bermakna untuk mengatasi berat ringannya persoalan yang akan dipikul bersama.

Dari aspek sosial, ekonomi maupun religi menunjukkan betapa kuatnya kearifan lokal berperan dalam penanggulangan bencana. Kearifan yang selama ini telah dijadikan sebagai panduan tindakan telah mampu memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah baik yang bersifat individual maupun masalah bersama. Kearifan sosial yang ada di masyarakat lereng Merapi ini tentunya dapat dipahami sebagai salah satu bentuk modal sosial dalam penanggulangan bencana. menurut Field (2011: 230) Modal sosial bisa disebut dengan modal selama hal ini melahirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan aktor individu dan kelompok untuk mencapai tujuan mereka secara lebih efektif dari pada mereka melakukan tanpanya.

Penguatan Kearifan Lokal

Dalam dinamika perkembangan penanggulangan bencana, model pendekatan yang selama ini digunakan dapat dikelompokkan dalam dua model pendekatan, yakni pendekatan yang berbasis spiritual dan pendekatan berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dari Analisis Penanggulangan Bencana berbasis Perspektif *Cultural Theory*, kedua pendekatan tersebut terdapat perbedaan. Kondisi ini tercermin dari diskursus tentang

penanggulangan bencana yang bersifat tradisional-teologis sampai rasionalistik-modern, pengetahuan tradisional yang berbasis pada pengalaman yang diwariskan secara turun temurun dengan pengetahuan ilmiah yang mendasarkan pada IPTEK, Sikap masyarakat yang pasif yakni kepasrahan bahwa semua fenomena bencana itu sudah ada yang mengatur/adikodrati sampai pada sikap aktif dalam pengelolaan penanggulangan bencana (*disaster management*), beradaptasi dan mereduksi bahaya kerentanan terhadap bencana (Jati, 2013).

Implementasi dari kedua model pendekatan di atas, tidak menutup kemungkinan terjadinya pertentangan dan bahkan dikotomi dalam penanggulangan bencana khususnya dalam pemanfaatan teknologi untuk menentukan status Merapi pada tahun 2006 dan ketika terjadi erupsi 2010. Bahkan tidak jarang ungkapan diskriminatif yang ditujukan pada pendekatan kearifan dengan istilah kolot atau kuno, bahkan sesat baik itu ditujukan kepada cara yang digunakan maupun pemanggunya. Padahal tujuan dari dua pendekatan tersebut adalah sama yakni masyarakat sebagai *community* merupakan komponen penting dalam penanggulangan risiko bencana dan kemaslahatan umat manusia (saat ini lebih dikenal pengurangan resiko bencana).

Gempa Yogyakarta 2006 dan Erupsi Merapi 2010 merupakan salah satu pengalaman menarik dan perlu dijadikan pelajaran untuk secara bening melihat suatu persoalan. Mengapa? Jawabnya sederhana, yakni masing masing pendekatan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu yang diperlukan adalah pelajaran apa yang dapat diungkap dari balik pengalaman tersebut (bukan mencari mana yang benar dan salah).

Kitikan terhadap masyarakat penganut

tradisional teologis, seringkali dikaitkan dengan masyarakat tradisional dengan orientasi pada pemikiran untuk pemenuhan kebutuhan saat ini. Masyarakat hanya memanfaatkan potensi alam sesuai dengan kebutuhannya. Mitos yang hidup di tengah masyarakat mempunyai pengaruh (etika) terhadap apa yang sebaiknya dilakukan dan perilaku apa yang harus dihindari. Perilaku masyarakat tradisional seringkali dipandang sebagai masyarakat tanpa orientasi masa depan. Jika dicermati, perilaku masyarakat ini didasari sebuah konsep penyelamatan alam dan lingkungan (Memayu Hayuning Bawono, Ambrasto Dur Hangkoro) bersifat universal dan dapat diberlakukan untuk setiap komunitas, bangsa dan negara. Pemanfaatan potensi alam tidak hanya untuk kepentingan sesaat tetapi untuk generasi yang akan datang, dan secara implisit didalamnya termasuk untuk mengurangi risiko bencana. Meskipun pendekatan yang digunakan disampaikan secara tersembunyi (tidak terus terang). Muhtadi (2011) mengungkapkan bahwa penggunaan mitos atau kepercayaan masyarakat setempat untuk mengeramatkan sebuah tempat masih efektif sebagai cara melestarikan alam disekitar tempat tersebut. Bahkan cara itu bisa berdampingan dengan institusi formal yang sudah ada seperti undang-undang termasuk aparat penegak hukum, itulah sebabnya banyak komunitas adat yang dulu sering menggelar ritual adat disebuah lokasi bertujuan agar menimbulkan kesan angker atau harus diperlakukan dengan hati-hati oleh masyarakat biasa.

Seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat, kearifan lokal juga akan selalu mengalami perkembangan dalam praktik penanggulangan bencana. Perkembangan ini tentunya tidak terlepas dari hasil inovasi IPTEK. Persoalannya adalah bagaimana adaptasi kecepatan kearifan lokal yang

termanifestasikan dalam bentuk tradisi terhadap perkembangan pengetahuan masyarakat. Di lingkungan masyarakat tradisional, nilai etis dan praktis seringkali menjadi persoalan dalam implementasi dari hasil inovasi IPTEK. Menurut Szompka (2007: 79) Agaknya sikap ideologis yang paling pantas terhadap tradisi adalah tradisi yang berpandangan kritis terhadap tradisionalisme. Pandangan kritis dimaksud adalah bersikap analitis dan skeptis terhadap manfaat dan mudharat tradisi di setiap kasus konkret, memperhatikan kadar dan lingkungan historis pengaruhnya. Sikap semacam ini menghindarkan taklid buta terhadap tradisi, mengikuti tradisi keliru yang menyamakan masa lalu dengan kebaikan. Ungkapan Sztomka ini mengindikasikan pentingnya sikap kritis dalam penentuan tindakan yang berhubungan dengan tradisi. Meski hidup dalam alam tradisi yang kuat, masyarakat terbuka dengan masuknya informasi dan inovasi IPTEK bahkan program dari luar tanpa meninggalkan tradisi. Menurut Soetomo (2012, p. 181) Dalam kehidupan bermasyarakat sering terdapat sebagian warganya yang mempunyai wawasan yang lebih luas, dan mempunyai kemampuan melihat lebih jauh ke depan. Gagasan dapat saja berasal dari mereka. Dengan kemampuannya mungkin saja mereka lebih cepat mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan bersama walaupun tidak berarti gagasan selalu muncul dari mereka, pada dasarnya setiap warga, setiap kelompok mempunyai kemampuan untuk identifikasi persoalan-persoalan yang perlu diantisipasi dalam hubungan antara masyarakat lokal dan nasional ini adalah perbedaan interpretasi terhadap situasi atau kondisi tertentu. Dalam menghadapi situasi atau permasalahan tertentu tidak jarang dijumpai perbedaan cara pandang baik dalam mendiagnosis masalah maupun cara pemecahan masalah antara masyarakat lokal dan negara. Terkait dengan hal ini Dekens (2007) *Local knowledge and practices are*

complex adaptive responses to internal and external change. Combined with conventional knowledge and understood in the wider context of sustainable development, they have a potentially valuable role to play in disaster risk reduction.

Hal penting yang perlu dijadikan catatan dalam praktek penanggulangan bencana adalah kearifan lokal telah membimbing masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan, baik dalam kondisi normal, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana. Soetomo (2012); Dekens (2007); Kusumasari & Alam (2012); dan (Suyuti, 2014) mengungkapkan bahwa kearifan lokal ataupun pengetahuan lokal telah digunakan oleh masyarakat dan memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat dalam penanggulangan bencana. Pentingnya kearifan lokal ini juga telah dijadikan sebagai salah satu pokok bahasan dalam *Fourth Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction* di Geneva 2013. Bencana yang terjadi di tingkat lokal dan solusi secara lokal, ini tidak berarti membebaskan tanggung jawab pemerintah nasional. Dalam konteks ini Pemerintah membangun kerangka kerja dan lingkungan yang mendukung untuk tindakan lokal. Pendekatan yang peka budaya dan berdasarkan prinsip inklusifitas, partisipasi dan pemberdayaan telah diidentifikasi sebagai cara untuk memastikan dampak berkelanjutan dalam membangun ketahanan masyarakat (UNISDR & UN, 2013).

PENUTUP

Dalam kerangka penanggulangan bencana, Kearifan lokal dapat berfungsi sebagai salah satu model yang sudah siap untuk diimplementasikan. Dalam konteks ini masyarakat lereng Merapi telah mempunyai model yang sudah termanifestasikan baik dalam perilaku hidup sehari-hari (dalam kondisi normal) dan secara insidental pada even tertentu

termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Model yang didasarkan pada nilai dan norma dan etika berperilaku untuk kelestarian alam yang dikonstruksi secara turun temurun.

Belajar dari kehidupan dan penghidupan masyarakat Lereng Merapi bagian selatan, ada beberapa hal yang dapat untuk yakni (1) Hidup harmoni dengan alam merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat telah berpikir tentang alam untuk kepentingan masa yang akan datang. (2) Kepasrahan dan keikhlasan dalam memandang fenomena gerak alam, bencana dan dampaknya merupakan salah satu nilai yang efektif untuk penanganan masalah sosial-psykologis bagi korban bencana (misalnya: trauma, kesedihan karena kehilangan harta benda dan saudara, perencanaan keluarga yang berantakan, keterbatasan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan minimnya fasilitas di pengungsian); dan (3) Berbagai bukti bahwa gotong royong merupakan modal sosial untuk penanggulangan bencana, baik pada masa darurat maupun pemulihan (rekonstruksi).

Masyarakat Lereng Merapi adalah masyarakat yang terbuka dengan berbagai inovasi terlebih lagi dalam inovasi bidang manajemen bencana. bahkan hampir semua program yang terkait dengan manajemen bencana baik yang melibatkan masyarakat (misalnya simulasi bencana, pelatihan penanggulangan bencana, pengelolaan dapur umum) maupun penggunaan alat komunikasi (elektronik) tidak terjadi penolakan. Rembug Desa yang diselenggarakan secara bulanan dan aktivitas gotong royong masyarakat lereng Merapi dapat digunakan sebagai salah satu jalur (mekanisme) mediasi untuk integrasi program dari luar (baik yang berasal dari Pemerintah, Dunia usaha, lembaga Perguruan Tinggi maupun lembaga non pemerintah).

Pengalaman dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat di daerah rawan bencana, banyak informasi penting tentang perilaku manusia yang belum nampak (terungkap) tetapi mempunyai signifikansi terhadap upaya pemecahan masalah termasuk di dalamnya permasalahan dalam penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal sebagai warisan sejarah menyediakan informasi gagasan dan materi yang dapat digunakan sebagai acuan tindakan kini dan masa depan. Oleh karena itu, optimalisasi peran masyarakat lereng merapi dalam penanggulangan bencana perlu program penguatan kapasitas masyarakat terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kebencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas dan BNPB. (2010). Rencana Aksi Nasional: Pengurangan Risiko Bencana. <http://www.mpbi.org/files/peraturan/RAN-PRB-2010-2012.pdf>.
- Dekens, J. (2007). Disaster Preparedness: A Literature Review. Kathmandu, Nepal: International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD).
- Djawanai, S. (2011). Kemanusiaan sebagai Pemandu dan Penjaga Kehidupan. Makalah yang disajikan pada FGD dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 11 Oktober 2011.
- Fatkhan, M. (2006). Kearifan Lingkungan Masyarakat Lereng Gunung Merapi. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VII, No. 2 Desember, 107-121.
- Field, J. (2010). Modal Sosial. Kasihan Bantul: Kreasi Wacana
- Gunawan. (2014). Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana: Kasus

- Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Infprmasi PERmasalahan dan Usaha KEsejahteraan Sosial, Volume 19 No. 2, Mei - Agustus 2014, 91 - 106.
- Gunawan. (2014). PenanggulanganBencana Alam Berbasis Masyarakat: Kasus Kampung Siaga Bencana Dalam Mengurangi Risiko Bencana Alam Di Kota Padang Sumatera Barat dan Kabupaten Sleman D.I Jogyaakarta. Konferensi Nasional Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI 25 November 2014. Jakarta.
- Gunawan., Roebiyanto, H., Sugiyanto, dan Murni, R. (2007). Pemberdayaan Keluarga Pazca Bencana Alam: Konsisi Sosial Masyarakat Dalam Manajemen Bencana. Jakarta: Puslitbang Kesos, Badiklit Kesos, Kemensos RI.
- Gusti, G. (2011, 01 11). UGM Tuan Rumah Konferensi Asia Pasifik Penyelamatan Bumi. Retrieved 03 23, 2015, from Universitas Gadjah Mada: <http://ugm.ac.id/id/berita/2950ugm.tuan.rumah.konferensi.asia.pasifik.penyelamatan.bumi>.
- Ife, J. dan Tesoriero, F. (2008). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Rea Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalaludin, R. (1999). Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi. Remaja Rosda Kaya: Bandung.
- Jati, W. R. (2013). Analisis Penanggulangan Bencana Berbasis Perspektif Cultural Theory. Jurnal Penanggulangan Bencana Vol. 4, No. 1, 1-12.
- Jeniarto, J. (2013). Diskursus local Wisdom: Sebuah Peninjauan Persoalan-persoalan. Jurnal Ultima Humaniora, I (2), hal 1-14.
- Koentjaraningrat. (1984). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- (1974). Pengantar Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.
- Kresna, A. A. (2013). Demokrasi dan Kekayaan dalam Pandangan Hidup Orang Jawa. Ultima Humaniora, September 2013, Vol. 1 nomor 2, 60-70.
- Krisanto, Y. A. (2011, Juli 10). Relokasi Korban Bencana: Legalistik vs Kultural-Historis (Kajian Penolakan Warga Lereng Merapi terhadap Kebijakan Relokasi). Retrieved 2 15, 2015, from Kompasiana: <http://hukum.kompasiana.com/2011/07/10/relokasi-korban-bencana-legalistik-vs-kultural-historis-kajian-penolakan-warga-lereng-merapi-terhadap-kebijakan-relokasi-377746.html>.
- Kusumasari & Alam, Q. (2012). Local Wisdom-Based Disaster Recovery Model in Indonesia. Disaster Prevention and Management Vol. 21 No. 3, 2012, 351-369.
- MTKRI. (2012, 10 9). Indonesia Memiliki 127 Gunung Api Aktif. Retrieved 02 11, 2015, from Media Kajian Informasi Tata Ruang Indonesia: <http://www.tataruangindonesia.com/fullpost/pemukiman/1349786866/indonesia-memiliki-127-gunung-api-aktif.html>
- Muhtadi, D. (2011). Ketika Kearifan lokal tergerus Zaman. In J. E. Wawa, Ekspsdisi Citarum, Sejuta Pesona dan Persoalan, Laporan Jurnalistik Kompas (pp. 9 - 21). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Ndraha, T. (1993). Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan MaAsyarakat Tingal Landas,. Jakarta: Rineka cipta.

- Padmosoekotjo, S. (2009). Gugon Tuhon. Jurnal Terjemahan Alam Dan Tamadun Melayu, I (2009), 167-171.
- Rakyat, P. (2012, 05 02). Indonesia Memiliki 127 Gunung Aktif. Retrieved 02 12, 2015, from Pikiran Rakyat: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/186891>
- Ridwan, N. A. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Ibda, Volume 5 Nomor 1, 27 - 38.
- Setiyadi, D. B. (2013). Discourse Analisis Of Serat Kalatidha Javanese. ASIAN Journal Of Social Sciences & Humanities Vol 2 Nomor 4, November, 292 - 300.
- Bappenas dan BNPB. (2010). Rencana Aksi Nasional: Pengurangan Risiko Bencana. <http://www.mpbi.org/files/peraturan/RAN-PRB-2010-2012.pdf>.
- Dekens, J. (2007). Disaster Preparedness: A Literature Review. Kathmandu, Nepal: International Centre for Integrated Montain Development (ICIMOD).
- Djawanai, S. (2011). Kemanusiaan segbai Pemandu dan Penjaga Kehisupan. Makalah yang disajikan pada FGD dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 11 Oktober 2011.
- Fatkhan, M. (2006). Kearifan Lingkungan Masyarakat Lereng Gunung Merapi. Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. VII, No. 2 Desember, 107-121.
- Field, J. (2010). Modal Sosial. Kasihan Bantul: Kreasi Wacana.
- Gunawan. (2014). PenanggulanganBencana Alam Berbasis Masyarakat: Kasus Kampung Siaga Bencana Dalam Mengurangi Risiko Bencana Alam Di Kota Padang Sumatera Barat dan Kabupaten Sleman D.I Jogjakarta. Konferensi Nasional Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI 25 November 2014. Jakarta.
- Gunawan, Roebiyanto, H., Sugiyanto, dan Murni, R. (2007). Pemberdayaan Keluarga Pazca Bencana Alam: Konsisi Sosial Masyarakat Dalam Manajemen Bencana. Jakarta: Puslitbang Kesos, Badiklit Kesos, Kemensos RI.
- Gusti, Grehenson. (2011, 01 11). UGM Tuan Rumah Konferensi Asia Pasifik Penyelamatan Bumi. Retrieved 03 23, 2015, from Universitas Gadjah Mada: <http://ugm.ac.id/id/berita/2950-ugm.tuan.rumah.konferensi.asia.pasifik.penyelamatan.bumi>
- Ife, J. dan Tesoriero, F. (2008). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Rea Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalaludin, R. (1999). Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi. Remaja Rosda Kaya: Bandung.
- Jati, W. R. (2013). Analisis Penanggulangan Bencana Berbasis Perspektif Cultural Theory. Jurnal Penanggulangan Bencana Vol. 4, No. 1, 1-12.
- Jeniarto, J. (2013). Diskursus local Wisdom: Sebuah Peninjauan Persoalan-persoalan. Jurnal Ultima Humaniora, I (2), hal 1-14.
- Koencaraningrat. (1984). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1974). Pengantar Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.
- Kresna, A. A. (2013). Demokrasi dan Kekayaan dalam Pandangan Hidup Orang Jawa. Ultima Humaniora, September 2013, Volume 1 nomor 2, 60-70.
- Krisanto, Y. A. (2011, Juli 10). Relokasi Korban Bencana: Legalistik vs Kultural-Historis

- (Kajian Penolakan Warga Lereng Merapi terhadap Kebijakan Relokasi). Retrieved 2 15, 2015, from Kompasiana: <http://hukum.kompasiana.com/2011/07/10/relokasi-korban-bencana-legalistik-vs-kultural-historis-kajian-penolakan-warga-lereng-merapi-terhadap-kebijakan-relokasi-377746.html>.
- Kusumasari & Alam, Q. (2012). Local Wisdom Based Disaster Recovery Model in Indonesia. *Disaster Prevention and Management* Vol. 21 No. 3, 2012, 351-369.
- MTKRI. (2012, 10 9). Indonesia Memiliki 127 Gunung Api Aktif. Retrieved 02 11, 2015, from Media Kajian Informasi Tata Ruang Indonesia: <http://www.tataruangindonesia.com/fullpost/pemukiman/1349786866/indonesia-memiliki-127-gunung-api-aktif.html>
- Muhtadi, D. (2011). Ketika Kearifan lokal tergerus Zaman. In J. E. Wawa, Ekspedisi Citarum, Sejuta Pesona dan Persoalan, *Laporan Jurnalistik Kompas* (pp. 9 - 21). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Ndraha, T. (1993). *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka cipta.
- Padmosoekotjo, S. (2009). Gugon Tuhon. *Jurnal Terjemahan Alam Dan Tamadun Melayu*, 1 (2009), 167-171.
- Rakyat, P. (2012, 05 02). Indonesia Memiliki 127 Gunung Aktif. Retrieved 02 12, 2015, from Pikiran Rakyat: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/186891>
- Ridwan, N. A. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Ibda*, Volume 5 Nomor 1, 27 - 38.
- Setiyadi, D. B. (2013). Discourse Analysis Of Serat Kalatidha Javanese. *ASIAN Journal Of Social Sciences & Humanities* Vol. 2 Nomor 4, November, 292 - 300.
- Siswadi, A. (2012, 09 28). 28 Kota Indonesia Terncaman Gunung Api. Retrieved 02 13, 2015, from Tempo.Co: <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/28/061432419/28-Kota-Indonesia-Terancam-Letusan-Gunung-Api>.
- Sleman. (2010, Desember 03). Jumlah Korban Meningga Bencana Erupsi Merapi Per Tanggal 2 Desember 2010. Retrieved Februari 12, 2015, from Pemerintah Kabupaten Sleman: [ht.tp://www.slemankab.go.id/category/update-data-korban-bencana-erupsi-gunung-merapi-2010](http://www.slemankab.go.id/category/update-data-korban-bencana-erupsi-gunung-merapi-2010).
- Sleman (2013). *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2012 - 2013*. Sleman: BPS Kabupaten Sleman.
- Soetomo. (2012). *Keswadayaan Masyarakat, Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2006). *Strategi Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solopos.com. (2014, 04 05). Entitas Budaya Gunung Tergerus Konsumerisme. Retrieved 02 21, 2015, from Solo Raya: <http://www.solopos.com/2014/04/05/gagasan-entitas-budaya-gunung-tergerus-konsumerisme-500634>
- Suryanto, D. (2013, 06 10). Labuhan Merapi. Retrieved 02 15, 2015, from Harian Jogja.com: <http://jogja.solopos.com/baca/2013/06/10/labuhan-merapi-414535>
- Suwito, Y. S. (2005). *Pelestarian Warisan Lingkungan Budaya Jawa dan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Industri Di DIY*. Simposium "Lingkungan Hidup dan Pariwisata" Memperingati 20 Tahun Kerjasama Propinsi DIY – Kyoto Prefecture, Japan. Yogyakarta, 18 - 19 Juli 2005.

- Suyuti, H. (2014). Yogyakarta City Disaster Risk Resilience Living in Harmony. Presented for 'Increasing the Resilience of Cities in the Middle East and North Africa', MENA Urbanization Knowledge Platform Conference. Marseille, France – May 22-23, 2014.
- Sztompka, P. (2007). Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Pustaka Media Group.
- UNISDR & UN. (2013). Chair's Summary. Proceedings: Fourth Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction, 19-23 May 2013 (pp. 12-14). Geneva, Switzerland: UNISDR & UN.
- Wikantiyoso, R. (2010). Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota? (Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana). *Journal Lokal Wisdom*, Vol. II Halaman: 18 - 29, Januari 2010, Nomor: 1, 18 - 29.